

## **Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kolaka Utara**

**Uswah Thalib<sup>1\*</sup>, Hermansyah<sup>2</sup>, Fitrawati AB<sup>3</sup>**

Afiliasi: <sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sinjai

Korespondensi Penulis: [1\\*uswahsyifa385@gmail.com](mailto:1*uswahsyifa385@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan tugasnya dalam pencegahan anak putus sekolah dan solusi sudah diberikan seperti melaksanakan Program Pemerintah yakni Program Indonesia Pintar (PIP), memberikan bantuan beasiswa duafa, beasiswa prestasi, beasiswa tahfidz, serta pengadaan layanan angkutan anak sekolah di semua Desa di Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu memberikan solusi berupa himbauan dan berkoordinasi kepada Kepala sekolah dan masyarakat, bagi siswa yang putus sekolah bisa mengikuti ujian penyetaraan Paket A (setara SD) dan Paket B (setara SMP). Dalam realisasi kebijakan terdapat hambatan yaitu faktor internal dimana motivasi anak sangat kurang untuk melanjutkan pendidikannya, dan dukungan orang tua yang tidak maksimal, karena ada orang tua yang menggunakan dan bantuan anak untuk keperluan konsumtif, selain itu faktor lingkungan sekitar yang cukup mempengaruhi anak putus sekolah. Namun dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat hambatan dalam proses realisasi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 Tentang Program Wajib Belajar, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar melalui koordinasi dan himbaun kepada seluruh kepala sekolah dan masyarakat baik menggunakan media sosial maupun secara langsung.

**Kata kunci:** Strategi; Penanganan; Putus Sekolah

### **ABSTRACT**

*This study aims to find out the Strategy of the Education and Culture Office in Overcoming School Dropouts in North Kolaka Regency. The type of research used is qualitative description research with a descriptive type of research, the data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources. The informants in this study were 5 people. Data collection techniques with in-depth interviews, direct observation and documentation. The results of this study show that the Education and Culture Office of North Kolaka Regency has done its job in preventing school dropouts and solutions have been provided such as implementing Government Programs, namely the Smart Indonesia Program (PIP), providing duafa scholarships, achievement scholarships, tahfidz scholarships, and the procurement of school child transportation services in all villages in North Kolaka Regency. In addition, it provides solutions in the form of appeals and coordination to school principals and the community, for students who drop out of school can take the equivalency exam for Package A (elementary school equivalent) and Package B (junior high school equivalent). In the realization of the policy, there are obstacles, namely internal factors where children's motivation is very lacking to continue their education, and parental support that is not optimal, because there are parents who use and help children for consumptive purposes, in addition to environmental factors*

*that quite affect children who drop out of school. However, it can be concluded that despite the obstacles in the process of realizing the policy, the North Kolaka Regency Education and Culture Office has implemented policies in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 Article 34 concerning the Compulsory Learning Program, and Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning the Smart Indonesia Program through coordination and appeals to all school principals and the community both using the media social and direct.*

**Keywords:** Strategy; Handling; Dropouts

**Informasi Artikel:** Submit: 27-7-2024 Revisi: 27-8-2025 Diterima: 15-9-2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan salah satu faktor yang mendasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga berperan sebagai sarana pembangunan sehingga sekolah menjadi wadah formal untuk memperoleh pendidikan sebagai salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang selama ini diperbincangkan, baik dikalangan praktis maupun teoritis. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada Pasal 34 ayat (1-3) menyebutkan bahwa: (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti wajib belajar; (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya; dan (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk dapat meningkatkan pembangunan suatu negara. Di Indonesia, proses pendidikan banyak mengalami perubahan-perubahan dan pengembangan yang sekiranya dapat meningkatkan pembangunan di Indonesia (Purwanto, 2006: Alifa, 2022). Namun, pada dasarnya masih ada problematika yang cukup serius yaitu terkait angka putus sekolah. Berdasarkan data diperoleh dari sumber literatur website di internet terkait "Angka Putus Sekolah di Indonesia Meningkat pada 2022". Bahwa angka putus sekolah di Indonesia terjadi peningkatan di tahun 2022, dari hal tersebut maka diproyeksikan terjadi beberapa hal-hal yang menghambat peserta didik untuk dapat menyelesaikan pendidikannya (Asmara & Sukadana, 2016: Alifa, 2022). Dengan demikian, diperlukan untuk meneliti lebih lanjut untuk dapat mengidentifikasi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan

angka putus sekolah di Indonesia pada tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan dapat membuat program- program dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Serta mendorong terjadinya proses otonomi baik pada pemerintah daerah maupun pada setiap satuan pendidikan agar memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, adil dan merata bagi setiap masyarakat (Benjamin dkk, 2017: Sulistriani, 2021).

Agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah lainnya, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) diantaranya yang disalurkan melalui berbagai skema akan berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil (Benjamin dkk, 2017: Sulistriani, 2021).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dilalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Fauzi, dkk, 2012: Sulistriani, 2021).

Sementara itu amanat yang jelas- jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan belum terlaksana secara maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengeyam pendidikan di bangku sekolah (Fauzi, dkk, 2012: Sulistriani, 2021). Program wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah (Lukman, 2019: Sulistriani, 2021).

Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak merupakan generasi muda yang nantinya akan mengukir bagaimana bangsa ini kelak. Anak juga merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga karena menentukan arah kemajuan bangsa selanjutnya. Maka dari itu diperlukan adanya strategi dalam proses pendidikan agar kualitas pendidikan benar- benar mampu sesuai dengan harapan (Islami, 2020: Sulistriani, 2021).

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya sangat membantu peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda bangsa Indonesia. Maka dari itu, anak perlu

mendapatkan perhatian akan hak-hak yang harus didapatkannya, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Namun pada kenyataannya, kebutuhan anak akan pendidikan tidak semuanya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak yang putus sekolah yang terjadi di Indonesia. Anak putus sekolah merupakan anak yang tidak melanjutkan pendidikannya.

Kasus anak putus sekolah ini merupakan kasus yang sangat rumit dan masih sulit diatasi sampai sekarang. Banyak faktor yang melatar belakangi anak putus sekolah, diantaranya yaitu faktor keluarga, geografi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Faktor penyebab tersebut dapat diminimalisir dengan adanya kesadaran pendidikan dari seluruh pihak, baik dari pihak anak, keluarga maupun pihak lingkungan. Kesadaran akan pendidikan

dapat menjadi dorongan yang kuat pada diri anak untuk tetap melaksanakan pendidikannya. Selain itu, pihak yang turut berperan dalam penanggulangan anak putus sekolah adalah pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan diharapkan mampu membantu anak agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya (Sandhopa, 2019; Sulistriani, 2021).

Dinas pendidikan Kabupaten Kolaka Utara adalah suatu instansi pemerintah yang menangani jenjang pendidikan dari SD, dan SMP di Kabupaten Kolaka Utara. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah sebagai pelaksana kebijakan teknis pendidikan. Meskipun telah terdapat usaha pemerintah dalam menyikapi hal tersebut yaitu dengan pembentukan beberapa peraturan perundang-undangan dalam melindungi warga negara dalam memperoleh pendidikan. Tetapi hal tersebut belum mencukupi seluruh aspek hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pada kenyataan di lapangan masih banyak kita temukan anak yang putus sekolah bahkan sama sekali tidak dapat mengenyam pendidikan. Adapun data anak putus sekolah dari tahun 2020-2024 dan data peserta didik dapat dilihat pada Tabel. 1 :

**Tabel. 1 Data Anak Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024 di Kabupaten Kolaka Utara**

No	Anak Putus Sekolah	SD	SMP	Jumlah	%
1	2020	250	121	371	26,6
2	2021	223	109	332	23,7
3	2022	163	79	242	17,31
4	2023	159	80	239	17,09
5	2024	141	73	214	15,31
<b>Jumlah</b>				<b>1.398</b>	<b>100 %</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka Utara, 2024

Dari data pada (Tabel.1) di atas dapat dideskripsikan bahwa pada tahun 2020 akan putus

sekolah pada jenjang SD dan SMP mencapai 26,6%, pada tahun 2021 terjadi penurunan 2,9% yaitu sebesar 23,7%, pada tahun 2022 terjadi penurunan 6,39% yaitu sebesar 17,31%, sementara pada tahun 2023 terjadi penurunan 22% yaitu sebesar 17,31%, dan pada tahun 2024 terjadi penurunan 1,78% yaitu sebesar 15,31%. Meskipun terjadi penurunan angka putus sekolah di Kabupaten Kolaka Utara sejak 5 (lima) tahun terakhir namun penurunannya tidak signifikan, olehnya itu harus ada tindakan ataupun kebijakan dari pemerintah melalui Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara agar membentuk strategi penanganan anak putus sekolah yang lebih efektif.

Rendahnya tingkat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah guna memajukan peradaban dan tingkat kehidupan yang lebih baik dan mandiri. Bukan hanya pemerintah saja yang memiliki tanggung jawab dengan hal ini namun yang terpenting adalah peran orang tua dan keluarga, karena orang tua dan keluarga merupakan pondasi utama dalam menanamkan pentingnya pendidikan. Dukungan mereka, baik secara emosional maupun material, sangat penting dalam membentuk kesadaran anak terhadap pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan mendorong timbulnya berbagai permasalahan sosial yang kian hari semakin meresahkan bangsa Indonesia. Salah satu faktor yang dapat menjadi tolak ukur rendahnya tingkat pendidikan adalah tingginya angka putus sekolah anak usia produktif (usia sekolah). Selain tingginya angka putus sekolah, rendahnya minat anak bahkan orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dirasakan masih sangat kurang (Kusbowo, 2016: Sulistriani, 2021).

Adapun satu hal pokok di atas dapat menjadi satu alasan betapa rendahnya tingkat pendidikan yang memang bila ditelaah lebih mendalam bukan hanya pemerintah saja yang perlu berpikir jauh, namun masyarakat dan tentunya para orang tua harus memahami benar betapa pentingnya pendidikan untuk bekal hidup maupun sebagai anggota dalam sistem tatanan masyarakat yang berbangsa dan bernegara (Kusbowo, 2016: Sulistriani, 2021).

Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara bersama orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan lainnya, pihak swasta dan sebagainya harus melihat masalah putus sekolah ini sebagai permasalahan yang sangat penting. Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita, dan perjuangan bangsa. Di samping itu, anak merupakan sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari berbagai

ancaman dan gangguan agar supaya hak-haknya tidak terabaikan.

Pemerintah, keluarga, masyarakat dan lingkungan setempat bertanggung jawab atas terjadinya fenomena anak putus sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, terlebih khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka yang bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin hak setiap masyarakat untuk mengeyam pendidikan, demi menciptakan masyarakat yang berkualitas maju, mandiri, dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif di masing-masing wilayah dan didukung oleh kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang harus lebih baik, sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apa saja strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penanganan Anak Putus Sekolah, dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kolaka Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara dalam menangani masalah anak putus sekolah. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan mulai Desember 2024 di beberapa lokasi strategis seperti Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara serta beberapa desa yang memiliki angka putus sekolah tinggi, yaitu Desa Delang-Delang, Sulaho, dan Larui. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer melalui observasi, wawancara langsung dengan informan kunci seperti Kepala Dinas dan perwakilan masyarakat, serta data sekunder berupa dokumen dan arsip. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan snowball sampling untuk memperoleh informasi yang valid dan komprehensif. Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar hasil penelitian dapat memberikan makna dan pemahaman mendalam terkait fenomena yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Setelah melakukan penelitian dengan judul Strategi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kolaka Utara. Maka data responden berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan maka didapatkan hasil penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang di harapkan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti secara jelas tentang permasalahan yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini yakni: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama, dan orang tua anak yang putus sekolah.

Data diri informan membantu peneliti untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan berasal dari sumber yang valid dan relevan dengan topik penelitian. Dengan mengetahui latar belakang informan, peneliti dapat mengevaluasi apakah informan tersebut memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Identitas informan diperlukan untuk memberi informasi dan gambaran yang akurat dalam hasil penelitian ini. Adapun data informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Data Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap kinerja, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi tingkat kinerja yang dimilikinya dan akan memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukannya penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang melibatkan beberapa unsur, salah satunya adalah tingkat pendidikan informan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi cara pandang dan pemahaman mereka terhadap suatu topik yang sedang diteliti, serta memengaruhi kualitas dan kedalaman jawaban yang diberikan selama proses pengumpulan data, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada (tabel: 4.4) di bawah ini mengenai tingkat pendidikan informan:

**Tabel. 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
S2	2	40 %
S1	-	0 %
SMA/Sederajat	2	40 %
SMP/Sederajat	1	20 %
SD	0	0 %
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan (Tabel. 2) di atas dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir S2 yaitu sebesar 40 % atau sebanyak 2 orang, responden dengan pendidikan SMA/ sederajat sebesar 40 % atau sebanyak 2 orang, dan responden dengan pendidikan SMP/ sederajat sebesar 20 % atau sebanyak 1 orang. Dapat disimpulkan pada tingkat keseluruhan pendidikan terakhir informan di atas termasuk memiliki pendidikan yang cukup baik.

## 2. Data Informan berdasarkan Usia

Umur merupakan faktor yang berpengaruh pada seseorang dalam menjalankan tugas yang diberikan, selain itu umur juga berpengaruh pada kinerja dikarenakan tingkat usia selalu menjadi faktor utama yang mempengaruhi pola pikir, tingkat ketelitian dalam bekerja, dan standar kemampuan fisik dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara umum, usia muda cenderung memiliki energi fisik yang lebih tinggi, kecepatan dalam belajar, dan kemampuan beradaptasi yang baik dengan perubahan atau teknologi baru. Namun, di sisi lain, usia yang lebih tua seringkali membawa pengalaman yang lebih banyak, ketelitian dalam bekerja, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang lebih sistematis dan terstruktur. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada (Tabel. 3) di bawah ini mengenai usia informan.

**Tabel. 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah	Persentase
20 – 29 Tahun	0	0 %
30 – 39 Tahun	1	20 %
40 – 49 Tahun	2	40 %
>50 Tahun	2	40 %
SD	0	0 %
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan (Tabel. 3) di atas dapat dilihat bahwa responden dengan usia 30-39 tahun yaitu sebesar 20 % atau sebanyak 1 orang, responden dengan usia 40-49 tahun yaitu sebesar 40 % atau sebanyak 2 orang, dan responden dengan usia > 50 tahun yaitu sebesar 40 % atau sebanyak 2 orang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara memegang peran penting sebagai ujung tombak dalam bidang pendidikan di daerah Kabupaten Kolaka Utara. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong kemajuan pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga merata bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara.

Dalam merealisasikan Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kabupaten Kolaka Utara, tentunya diperlukan pencapaian indikator, yaitu: (1) Pengamatan Lingkungan, (2) Perumusan Strategi, (3) Implementasi Strategi, dan (4) Evaluasi dan Pengendalian. Untuk melihat Strategi Pemerintah Strategi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kabupaten Kolaka Utara, maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap informan berdasarkan indikator sebagai berikut :

**a. Pengamatan Lingkungan**

Pengamatan lingkungan adalah suatu tahap dimana pimpinan perlu menyadari bahwa organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Perjalanan organisasi dipengaruhi oleh suatu peristiwa, perkembangan, serta perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Perubahan tersebut bisa berasal dari luar lingkungan maupun dalam lingkungan yang disebut dengan faktor internal dan faktor eksternal.

Dari semua hasil wawancara yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan dari segi pencegahan anak putus sekolah dan solusi sudah diberikan dengan baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, seperti biaya pendidikan yang digratiskan, pemberian berbagai macam beasiswa, dan pengadaan angkutan anak sekolah di setiap desa.

Namun, meskipun sudah ada berbagai upaya dari pemerintah daerah

khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, keberhasilan dalam menurunkan angka putus sekolah sangat tergantung pada kesadaran dan motivasi anak itu sendiri, serta pengaruh lingkungan disekitarnya, termasuk keluarga dan teman-teman sebaya.

**b. Perumusan Strategi**

Perumusan strategi merupakan tahap pengambilan keputusan mengenai alternatif yang akan dipilih oleh instansi/organisasi. Hasil yang dipilih berdasarkan hasil dari pengamatan lingkungan yang telah dilakukan. Perumusan strategi adalah sebuah proses yang melibatkan pengamatan yang cermat terhadap lingkungan internal dan eksternal lembaga/organisasi, analisis berbagai alternatif yang ada, serta pemilihan strategi yang paling sesuai dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan lembaga/organisasi di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama mengenai pembuatan program dan langkah-langkah mengatasi anak putus sekolah yakni dengan mengedepankan Program Indonesia Pintar (PIP), dan juga menyediakan beberapa program beasiswa prestasi dan layanan angkutan anak sekolah demi meminilisir anak putus sekolah karena faktor ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang tua anak yang putus sekolah, dapat disimpulkan bahwa program pemerintah Program Indonesia Pintar (PIP) seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan beasiswa prestasi, dan layanan angkutan anak sekolah tersebut memberikan kemudahan, dan masyarakat sangat setuju dengan adanya program tersebut, tetapi ada kendala yang lebih mendalam yang menghalangi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan, yaitu motivasi anak, faktor lingkungan, dan dukungan dari orang tua. Oleh karena itu, selain menyediakan akses pendidikan, dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan motivasi anak dan memberikan dukungan yang lebih aktif dari orang tua untuk memastikan anak-anak dapat melanjutkan

pendidikan mereka.

**c. Implementasi Strategi**

Implementasi strategi merupakan pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan atau direncanakan. Hasil yang dipilih berdasarkan hasil dari implementasi strategi yang telah dilakukan. Implementasi strategi merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa rencana yang telah dirumuskan tidak hanya tetap sebagai konsep, tetapi benar-benar dijalankan dan mencapai hasil yang diinginkan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pengelolaan yang baik terhadap sumber daya, komunikasi yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara bisa dilihat bahwa untuk kebijakan program itu wajib belajar 12 tahun dan untuk anggaran khususnya penanganan anak putus sekolah belum ada. Namun telah menyediakan dana pendidikan berupa bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa prestasi, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) serta layanan angkutan anak sekolah.

Berdasarkan wawancara bersama Kabig Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama bisa dilihat bahwa kebijakan pembuatan program dan prosedur penganggaran dana untuk anak putus sekolah merupakan bukan kewenangan dari Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama melainkan dari pemerintah daerah.

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama sebatas menyusun usulan anggaran untuk berbagai program pendidikan, termasuk program yang bertujuan mengatasi anak putus sekolah. Anggaran ini diajukan berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang ada di tingkat sekolah dan kecamatan. Setelah anggaran diajukan, keputusan mengenai alokasi dana akan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara serta Pemerintah Daerah. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama hanya berperan dalam menyusun dan mengajukan anggaran, sedangkan keputusan mengenai penggunaan dana sepenuhnya tergantung pada otoritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat orang tua anak putus sekolah terkait program wajib belajar yang tertera pada PERMENDIKBUD Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 2 wajib belajar 6 tahun sampai dengan 21 tahun atau tamat satuan pendidikan menengah memang sudah di sosialisasikan kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial dan sosialisasi secara langsung agar masyarakat mengetahui tentang pendidikan dan bantuan-bantuan yang dicanangkan oleh pemerintah agar terselenggara dengan baik dan tepat sasaran.

Meskipun Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah kebijakan yang sangat positif untuk mengurangi angka putus sekolah, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perubahan tersebut, seperti yang terlihat dalam wawancara dari orang tua anak yang putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan diseminasi informasi terkait kebijakan wajib belajar hingga 12 tahun agar lebih banyak orang tua, terutama yang berada di daerah terpencil, dapat mengetahui hak pendidikan yang dimiliki anak-anak mereka dan lebih mendukung mereka untuk melanjutkan sekolah hingga jenjang SMA/SMK.

#### **d. Evaluasi dan Pengendalian**

Evaluasi dan Pengendalian merupakan dua proses yang sangat penting dalam manajemen untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam konteks manajemen, kedua proses ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga agar organisasi tetap pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan jangka panjang, sambil melakukan penyesuaian yang diperlukan secara dinamis untuk menanggapi perubahan atau hambatan yang muncul.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara mengenai program beasiswa cukup baik hanya saja perlu dievaluasi kembali karena masih ada orang tua penerima yang tidak menggunakannya sesuai dengan kebutuhan namun hanya digunakan untuk keperluan konsumtif, selanjutnya sarana prasarana jika dilihat dilapangan khususnya di kecamatan yang berada pegunungan untuk akses sarana elektronik dan jalanan belum maksimal, namun terkait hal tersebut PEMDA Kolaka Utara memberikan perhatian lebih khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara agar pemerataan akses pendidikan dapat tercapai, baik

dari segi infrastruktur maupun teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama orang tua dari anak yang putus sekolah di Kabupaten Kolaka Utara jika dilihat dari tanggapan tersebut secara keseluruhan, meskipun kualitas jaringan belum maksimal, akses jalanan belum sepenuhnya optimal, namun sarana dan prasarana pendukung proses belajar pembelajaran di sekolah di Kabupaten Kolaka Utara sudah cukup memadai.

Berdasarkan hasil wawancara bersama orang tua dari anak yang putus sekolah di 3 (tiga) Kecamatan berbeda di Kabupaten Kolaka Utara, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa meskipun kualitas jaringan internet dan akses jalanan yang belum diaspal di beberapa desa masih belum maksimal, sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar di sekolah-sekolah di Kabupaten Kolaka Utara sudah cukup memadai. Fasilitas seperti ruang kelas, lapangan olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya telah tersedia dan mendukung kelancaran proses pendidikan di setiap sekolah di Kabupaten Kolaka Utara. Namun, perbaikan pada aspek jaringan dan infrastruktur jalan masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan lebih lanjut.

### **3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penerapan Strategi Pemerintahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kolaka Utara**

Dalam menerapkan sebuah strategi pemerintah untuk mengatasi masalah anak putus sekolah di Kabupaten Kolaka Utara, terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung serta menghambat keberhasilan program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.

#### **a. Faktor Penghambat**

1) Berdasarkan Indikator Pengamatan Lingkungan, dalam menjalankan sebuah strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kabupaten Kolaka Utara ini yang menjadi hambatan, baik dari pemerintah itu sendiri maupun masyarakat yakni pengaruh lingkungan sekitar. Salah satu pemicu utamanya perilaku pada anak terletak pada lingkungan sekitar. Karena teman bermain itu bisa memberikan dampak positif dan dampak negatif.

2) Hambatan dalam strategi Pemerintahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara dalam mengatasi anak putus sekolah di Kabupaten Kolaka Utara, yaitu rendahnya motivasi anak hal ini ditandai dengan anak yang berhenti sekolah dengan alasan tidak mampu belajar dan lebih senang mendapatkan uang dalam membantu orang tua/keluarga bekerja. Sementara dari dukungan keluarga sangat mempengaruhi keputusan anak untuk melanjutkan pendidikan. Jika orang tua kurang mendukung atau tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pentingnya pendidikan, anak cenderung lebih memilih untuk tidak melanjutkan sekolah, terutama jika anak sudah mampu menghasilkan uang dengan membantu keluarga. Di samping itu juga masih ada orang tua yang memakai dana bantuan pendidikan anak untuk keperluan konsumtif semata.

**b. Faktor Pendukung**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 Tentang Program Wajib Belajar, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.
- 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara menyediakan anggaran khusus bagi anak tidak mampu melalui program beasiswa duafa, beasiswa prestasi, beasiswa tahfidz, dan penyediaan layanan angkutan anak sekolah di setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara yang bekerja sama dengan PEMDA Kolaka Utara.
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Bidang Pendidikan dasar dan Menengah Pertama aktif dalam melakukan kampanye atau sosialisasi terkait dengan kebijakan Program Indonesia Pintar dan kebijakan-kebijakan lainnya melalui media sosial maupun secara langsung di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
- 4) Penyediaan layanan ujian penyetaraan untuk ijazah Paket A (setara SD) dan Ijazah Paket B (setara SMP).

**Pembahasan**

Strategi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dalam

penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Kolaka Utara merupakan upaya pemberdayaan sosial dan pembangunan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh anak, khususnya yang berisiko putus sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator pengamatan lingkungan menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah itu disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dari semua hasil wawancara yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan dari segi pencegahan anak putus sekolah dan solusi sudah diberikan dengan baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, seperti biaya pendidikan yang digratiskan, pemberian berbagai macam beasiswa, dan pengadaan angkutan anak sekolah di setiap desa. Namun, meskipun sudah ada berbagai upaya dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, keberhasilan dalam menurunkan angka putus sekolah sangat tergantung pada kesadaran dan motivasi anak itu sendiri, serta pengaruh lingkungan disekitarnya, termasuk keluarga dan teman-teman sebaya.

Pada indikator perumusan strategi menunjukkan bahwa program pemerintah Program Indonesia Pintar (PIP) seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan beasiswa prestasi, dan layanan angkutan anak sekolah tersebut memberikan kemudahan, dan masyarakat sangat setuju dengan adanya program tersebut, tetapi ada kendala yang lebih mendalam yang menghalangi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan, yaitu motivasi anak, faktor lingkungan, dan dukungan dari orang tua. Oleh karena itu, selain menyediakan akses pendidikan, dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan motivasi anak dan memberikan dukungan yang lebih aktif dari orang tua untuk memastikan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan mereka.

Pada indikator implementasi strategi terkait program wajib belajar yang tertera pada PERMENDIKBUD Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 2 wajib belajar 6 tahun sampai dengan 21 tahun atau tamat satuan pendidikan menengah memang sudah di sosialisasikan kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial dan sosialisasi secara langsung agar masyarakat mengetahui tentang pendidikan dan bantuan-bantuan yang dicanangkan oleh pemerintah agar terselenggara dengan baik dan tepat sasaran.

Pada indikator evaluasi dan pengendalian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan evaluasi setiap program agar program yang telah di laksanakan terealisasi dengan baik dan tepat sasaran seperti Program Indonesia

Pintar (PIP), Bantuan Siswa Miskin (BSM), berbagai macam beasiswa, pengadaan layanan angkutan anak sekolah di semua Desa di Kabupaten Kolaka Utara, serta alternatif lain seperti penyediaan layanan ujian kesetaraan Paket A (setara SD) dan Paket B (setara SMP) agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah.

Sementara faktor penghambat pada indikator pengamatan lingkungan yang menjadi hambatan yaitu dari masyarakat sendiri yakni pengaruh lingkungan sekitar. Salah satu pemicu utamanya yaitu, motivasi dan perilaku pada anak terletak pada lingkungan sekitar. Karena teman bermain itu bisa memberikan dampak positif dan dampak negatif pada diri anak. Sementara dari dukungan orang tua perlu dievaluasi kembali karena masih ada orang tua penerima bantuan pendidikan anak yang tidak menggunakannya sesuai dengan kebutuhan namun hanya digunakan untuk keperluan konsumtif.

Sementara faktor pendukung Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Kolaka Utara, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 Tentang Program Wajib Belajar, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.
- 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara menyediakan anggaran khusus bagi anak tidak mampu melalui program beasiswa duafa, beasiswa prestasi, beasiswa tahfidz, dan penyediaan layanan angkutan anak sekolah di setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara yang bekerja sama dengan PEMDA Kolaka Utara.
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Bidang Pendidikan dasar dan Menengah Pertama aktif dalam melakukan kampanye atau sosialisasi terkait dengan kebijakan Program Indonesia Pintar dan kebijakan-kebijakan lainnya melalui media sosial maupun secara langsung di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
- 4) Penyediaan layanan ujian penyetaraan untuk ijazah Paket A (setara SD) dan Ijazah Paket B (setara SMP).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa meskipun berbagai upaya dan strategi telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara untuk menanggulangi angka putus sekolah, kesuksesan dalam menurunkan angka putus sekolah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Upaya yang

telah dilakukan, seperti pemberian biaya pendidikan yang digratiskan, penyediaan berbagai macam beasiswa, dan pengadaan angkutan sekolah di setiap desa, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun, motivasi anak dan dukungan lingkungan, termasuk keluarga dan teman-teman sebaya, masih menjadi faktor penghalang utama yang perlu diatasi lebih lanjut.

Penyediaan akses pendidikan melalui program-program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta berbagai beasiswa dan layanan angkutan sekolah memang telah mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Meskipun demikian, kendala terbesar yang dihadapi adalah motivasi anak untuk melanjutkan pendidikan dan kurangnya dukungan aktif dari orang tua dalam memanfaatkan bantuan pendidikan sesuai kebutuhan anak, yang masih sering digunakan untuk keperluan konsumtif.

Dalam hal implementasi, sosialisasi terkait kebijakan wajib belajar dan program pendidikan sudah dilakukan dengan baik melalui media sosial dan langsung kepada masyarakat, namun masih dibutuhkan evaluasi dan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, baik terkait Program Indonesia Pintar, Bantuan Siswa Miskin, beasiswa, maupun penyediaan ujian kesetaraan, menunjukkan upaya yang serius dalam mengatasi masalah anak putus sekolah.

Secara keseluruhan, meskipun telah ada berbagai upaya baik dari pemerintah daerah, keberhasilan dalam mengurangi angka putus sekolah sangat bergantung pada sinergi antara akses pendidikan yang mudah, motivasi anak, dan peran aktif orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Oleh karena itu, selain meningkatkan fasilitas pendidikan, diperlukan juga pendekatan yang lebih intensif untuk memperkuat kesadaran orang tua serta meningkatkan motivasi anak untuk terus melanjutkan pendidikan.

## **KESIMPULAN**

Dalam upaya pencegahan anak putus sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara telah mengimplementasikan solusi berupa penggratiskan biaya pendidikan, pemberian berbagai macam beasiswa, serta penyediaan layanan angkutan sekolah di setiap desa. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara juga menjalankan program Pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan beasiswa

untuk berbagai kategori, dan menyediakan alternatif ujian kesetaraan bagi anak yang putus sekolah, yakni Paket A dan Paket B.

Faktor penghambat utama dalam pencegahan anak putus sekolah di Kabupaten Kolaka Utara berasal dari pengaruh lingkungan sekitar, terutama terkait dengan motivasi dan perilaku anak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Selain itu, meskipun ada dukungan dari orang tua, masih ada beberapa yang tidak memanfaatkan bantuan pendidikan dengan optimal, sehingga perlu adanya evaluasi terkait penggunaan bantuan tersebut. Sementara faktor pendukung dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Kolaka Utara antara lain adalah adanya regulasi yang mendukung seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait program wajib belajar serta Program Indonesia Pintar. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara juga telah menyediakan berbagai program beasiswa untuk anak tidak mampu, serta layanan angkutan sekolah yang menjangkau seluruh desa di wilayah Kabupaten Kolaka Utara. Upaya aktif dalam kampanye sosialisasi program-program tersebut juga menjadi faktor penting dalam mengedukasi masyarakat. Tak kalah penting, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menyediakan layanan ujian penyeteraan bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, seperti ujian Paket A (setara SD) dan B (setara SMP), yang memberikan peluang pendidikan bagi anak putus sekolah.

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan hasil yang positif dalam mencegah angka putus sekolah, serta berkontribusi pada pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara. Meski demikian, masih dibutuhkan peningkatan dalam pengawasan penggunaan dana pendidikan oleh orang tua agar bantuan yang diberikan bisa digunakan dengan tepat sasaran dan lebih efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alifa, Vita Nur. 2023. Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Putus Sekolah di Indonesia Pada Tahun 2022. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jpsa/index>. Diakses pada tanggal 28 November 2024.

Andayani, Luci Dian, dkk. 2021. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (ATS) di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2024.

BPS. 2024. Persentase Penduduk Berumur 7-15 Tahun ke Atas Putus Sekolah Menurut di

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)

EISSN: 2745-875X, Vol. 6 No. 3 (2025): Community Empowerment Hal: 167-186

DOI: 10.55314/jcoment.v6i3.982

Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Sumber:  
<https://kolutkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/53cfbdf4205a504afa83d79/kab-upaten-kolaka-utara-dalam-angka-2024.html>. Diakses pada tanggal 28 November 2024.

Bejamin, Morin, dkk. 2022. Strategi Dinas Pendidikan dalam Meminimalisir Anak Putus Sekolah di Kota Bitung. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/16587>. Diakses pada tanggal 28 November 2024.

Fadhilah & Syahril. 2019. Peran Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Serambi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam. E-Journal on-line. Sumber:  
[https://ojs.serambimekkah.ac.id/tarbawi/article/view/1375?\\_cf\\_chl\\_tk=bkj0mddeca\\_s2nyzzzzlvzyqbdx\\_ioi2vcsd.cmkrym8-1734045750-1.0.1.1-pt7bigh8ecqrqe.n3qk6g1rsrg80ml.kfnwouc79eno](https://ojs.serambimekkah.ac.id/tarbawi/article/view/1375?_cf_chl_tk=bkj0mddeca_s2nyzzzzlvzyqbdx_ioi2vcsd.cmkrym8-1734045750-1.0.1.1-pt7bigh8ecqrqe.n3qk6g1rsrg80ml.kfnwouc79eno). Diakses pada tanggal 28

Fatimah, Nurul, dkk. 2021. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. E-Journal. Sumber:  
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb>. Diakses pada tanggal 28 November 2024.

Fitrawati, Baharuddin, & Kiki Rasmala Sani. 2024. Pedoman Penulisan Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sinjai. UMSI Press: Sinjai.

Hamim, Sufian & Wiwik Suryandartiwi. 2022. Organisasi Birokrasi dan Manajemen Pemerintahan. Book on-line. Eureka Media Aksara. Sumber:  
<https://repository.uir.ac.id/18723/1/EBOOK-Organisasi%20Birokrasi%20dan%20Manajemen%20Pemerintahan.pdf> Diakses pada tanggal 30 November 2024.

Irfan, dkk. 2022. Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendidikan Anak Putus Sekolah di Desa Pai Kecamatan Wera. <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Pendikdas>. Diakses pada tanggal 28 November 2024.

Kristian, Indra. 2023. Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. <http://jurnaldialektika.com/>. Diakses pada tanggal 28 November 2024.

Lestari, Ayu Yeni Budi, dkk. 2020. Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD). Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar. E-Journal on-line. Sumber:  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISD/index>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2024.

Mustanir, Ahmad, dkk. 2023. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Book on-line. CV. Eureka Media Aksara. Sumber:  
<https://repositori.ulm.ac.id/handle/123456789/32859?show=full>. Diakses pada tanggal 30 November 2024.

Mustanir, Ahmad, dkk. 2022. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Book on-line. CV. Eureka

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)

EISSN: 2745-875X, Vol. 6 No. 3 (2025): Community Empowerment Hal: 167-186

DOI: 10.55314/jcoment.v6i3.982

Media Aksara. Sumber:  
<https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/556912-pengantar-ilmu-pemerintahan-73ccc272.pdf>. Diakses pada tanggal 30 November 2024.

Purwatiningsih, Annisa & Agung Suprojo. 2024. Implementasi Kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam Menangani Anak Putus Sekolah di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. E-Journal on-line. Sumber: <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/4784>. Diakses pada tanggal 30 November 2024.

Risqah, Muftihah, dkk. 2024. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i1.23>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2024.

Sari, Dian Citra, dkk. 2020. Manajemen Pemerintahan. Gorontalo. Book on-line. Ideas Publishing. Sumber: <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/7509/heldy-vanni-alam-manajemen-karier-dan-perencanaan-karier-buku-manajemen-pemerintahan.pdf>. Diakses pada tanggal 30 November 2024.

Sulistriani. 2021. Strategi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kecamatan Gaung Kabupaten Inragiri Hilir. Skripsi on-line. Sumber: <https://repository.uir.ac.id/7078/1/sulistriani.pdf>. Diakses pada tanggal 30 November 2024.

Sujana, I Wayan Cong. 2019. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia. <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/AW>. Diakses pada tanggal 28 November 2024.